DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdullah, Dadang. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan. Al'Adl.
- Agus, I. I. (2020). Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Orangtua (Ibu) Dalam Perspektif Perlindungan Anak. 15.
- Bram, S. A. (2013). *Hukum dan Keadilan Aspek Nasional dan Internasional*. PTRaja Grafindo Persada.
- Bimantara, I.G.A Dian dan I.P Sudarma Sumadi. (2018). Konsep Restusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia. Kertha Wicara.
- Dahlan Thaib. (2003). *Tata Cara Mengaplikasikan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: FH Ulf.
- DR. Drs. Muntoha, S. M. (2013). *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Kaukaba.
- Dr. A. Widiada Gunakaya S.A., S. M. (2017). Hukum Hak Asasi Manusia.
- Dr. Mardi Candra, S. M. (2018). Aspek Perlidnungan Anak Indonesia Analisistentang Perkawinan di Bawah Umur. Kencana.
- Dr. Teguh Prasetyo, S. M. (2018). Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum.
- Dr. Dahlan Sinaga, S. M. (2021). Diversi Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif Menurut Perspektif Teori Keadilan Bermartabat: Seri Penegakan Hukum. Nusamedia.
- Dr. Hijrah Lahaling, S. M. (2021). Pemenuhan Hak-hak Anak Pekerja MigranIndonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
- Eka Periaman Zai, S. M. (2020). Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara.
- Gosita, A. (1989). Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Huda, M. (2009). Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial.
- Iskandar, A. M. (2021). *Negara dan Politik Kesejahteraan Reorientasi Arah BaruPembangunan*. PT Gramedia Pustaka Utama.

- Maidin Gultom. (2012), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Kelsen, H. (2019). *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif.*Nusamedia.
- Liza Agnesta Krisna, S. M. (2018). Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.
- Mansur, D. M. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara NormaDan Realita*. Raja Grafindo Persada.
- Melani S.H., M. (2013). Hukum Pidana Anak. Refika Aditama.
- Ni'matul Huda, S. M. (2020). Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.
- Prof. DR. Ir.Zoer'aini Djamal Irwan, M. (2009). *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Putri S.A. (2017). Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) dan Pekera Anak Di Bawah Umur Di Jawa Barat. Dharmakarya
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rawls, J. (2011). A tHeory Of Justice Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politikuntuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara.
- Ratri Novita Erdianti, S. M. (2020). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.
- Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rajwa Raidha Adudu, Marhcel R. Maramis dan Diana Esther Rondonuwu. (2022). Perlindungan Hukum terhadap KorbanTindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.
- Subagyo, P. J. (1997). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Supartono. (2004). *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*. Semarang: Yayasan Setara, 1, 10.
- S.H, P. D. (2012). Pengantar Ilmu Sosial.
- Suratman, P. D. (2013). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.

- Subagyo, P. J. (1997). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soraya, Anis, dkk. (2015). *Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Suryana, V. B. (2018). Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak.
- Saptosih Ismiati, S. M. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) DanHak Asasi Manusia (HAM)*. CV Budi Utama.
- Wiyono, R. (2016). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Y. Sari Murti W. (2012). Kajian dan Mekanisme Perlindungannya Anak.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Human Rights)

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA)
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019

C. Sumber Lain

- Armani., A. (2002). Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan. <u>Http://Anjal.Blogdrive.Com/Archive/11.Html.</u>
- Alycia Sandra Dina Andhini, R. A. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1, 52.
- Beta S Iryani, Priyarsono. (2013). Eksploitasi Terhadap Anak Yang Bekera di Indonesia. Journal Volume 13 Nomor 2.
- Departemen Sosial RI. (2001). Intervensi Psikososial. Jakarta: Departemen Sosial.
- Dinamika Sosial. (2017). Modul Pelayanan Sosial Anak Jalanan. Direktoral Jenderal Pelayanan & Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial RI.
- Eleanora, F. N. (2019). Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak). 14.
- Hasil Wawancara Dinas Sosial Kota Bandung. (2023). Bandung: Dinas Sosial Kota Bandung.
- Kurnia, A. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Bandung Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. 138.
- Mia Audina, O. S. (2022). TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELAKU TINDAK PIDANA. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 9 No. 2, 1023.
- M. Ramadhani, S. H. (2016). PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN ANAK. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6, Nomor 11, 954.
- Pahlevi, V. R. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. 9.

- Priegel Manggolokusumo, Y. W. (2020). Upaya Perlindungan Hukum TerhadapAnak Selaku Korban. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology Volume Nomor 2, 126.
- Suhendi, A. (2013). Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Sosio Informa, 18(2), 105–116. https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v18i2.73
- Sumirat, Lin Ratna. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Keahatan Perdagangan Manusia. Journal Studi Gender dan Anak.
- Ridlwan, Z. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. FiatJustitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2, 152.
- Sadjali, M. G. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak Jalanan Balong Cangkring Di Kota Mojokerto. 309.
- Departemen Sosial RI. (2001). Intervensi Psikososial. Departemen Sosial.
- Dinamika Sosial. (2017). Modul Pelayanan Sosial Anak Jalanan. Direktoral Jenderal Pelayanan & Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial RI.